



THE INFLUENCE CLARITY OF BUDGET TARGETS AND REPORTING SYSTEMS ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF BAUBAU CITY GOVERNMENT AGENCIES

Fariz Mustaqim^{*1}, La Ode Abdul Rakhman², Deki Pardana³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Corresponding Author: farizmustaqim5@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 April 2024</p> <p>Revised : 08 Mei 2024</p> <p>Accepted : 01 Juni 2024</p> <p>Publication : 30 Juni 2024</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Clarity of Budget Targets, Reporting System, Accountability of Government Agency Performance</i></p> <p>Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze the effect of budget target clarity and reporting systems on the performance accountability of Baubau City government agencies. The population in this study is the Baubau City Government which consists of all local government organizations (OPD) in the city of Baubau, totaling 32 OPDs. each OPD has 3 respondents so that the sample in this study amounted to 96 respondents. The method used is quantitative descriptive analysis method using multiple linear regression. Based on the results of the study, it can be concluded that (1) budget target clarity affects the performance accountability of Baubau City government agencies, with a significance value of $0.000 < 0.05$; (2) the reporting system affects the performance accountability of Baubau City government agencies, with a significance value of $0.000 < 0.05$; and (3) budget target clarity and reporting systems simultaneously affect the performance accountability of Baubau City government agencies.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Baubau. Metode penelitiannya dengan Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Baubau yang terdiri atas seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) Se-kota Baubau yang berjumlah 32 OPD. tiap OPD memiliki 3 responden sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Baubau, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$; (2) sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Baubau, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$; dan (3) kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Baubau.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas. Agar dapat mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata (Agustin, 2018:1).

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ilmar, 2020:7).

Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah menggunakan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintah

yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Kinasih, 2018:2).

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini menugaskan kepada para pemimpin instansi pemerintah untuk merumuskan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi (Fauzan, 2017:123).

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan (Hasanah, 2021:3).

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana anggaran lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Handayani, 2023:8).

Selain rencana anggaran, sistem pelaporan juga diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Precelina dan Wuryani, 2015:2).

Sistem pelaporan adalah salah satu cara dari pengendalian akuntansi dengan adanya pengendalian maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka dari itu sistem pelaporan sangat penting dalam pemerintahan karena semakin tinggi sistem pelaporan yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Handayani, 2023:10).

Penelitian Kinasih (2018) dan Precelina, Wuryani (2015), dan Handayani (2023) tentang kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, penelitian yang bertentangan adalah penelitian Kartika dan Sukamto (2019), Mikoshi (2020), Widaryanti dan Pancawardani (2020) dan Hafzhan (2021), berkesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu penelitian dengan topik akuntabilitas kinerja ini dapat diteliti kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan sasaran anggaran dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan

karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Zakiyudin dan Suyatno, 2015:90).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara spesifik dan jelas sehingga anggaran tersebut mudah dimengerti oleh penanggung jawab atas pencapaian anggaran merupakan penjelasan dari kejelasan sasaran anggaran. Anggaran pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kejelasan sasaran anggaran dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu: (1) spesifik, (2) terukur, dan (3) berorientasi pada hasil akhir (Handayani, 2023:31).

Sistem pelaporan seringkali dikembangkan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Dalam lingkungan penyelenggaraan/tatalaksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen (Agustin, 2018:11). Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. Pada saat ini pengembangan sistem pelaporan kinerja agaknya masih ketinggalan dibandingkan dengan pengembangan sistem pelaporan keuangan (Mikoshi, 2020:194). Sistem pelaporan dapat diukur dengan menggunakan indikator (Agustin, 2018:11) yaitu:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi;
3. Manajemen.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hafzhan, 2021:11). Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mahsun dalam Hasanah, 2021:19) yaitu:

1. Indikator masukan (*input*);
2. Indikator proses (*process*);
3. Indikator keluaran (*output*);
4. Indikator hasil (*outcome*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner (angket). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Baubau yang terdiri atas seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) Se-kota Baubau yang berjumlah 32 OPD. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang dipilih pada penelitian ini yaitu pegawai yang berhubungan dengan variabel penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan, yang didasari bahwa responden inilah yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, tiap OPD memiliki 3 responden sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) yang telah disiapkan untuk dijawab oleh responden dan akan diberikan kepada Kepala OPD/Dinas, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan. Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Alat statistik yang digunakan untuk membantu dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah alat statistik SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 25. Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner perlu untuk diuji, sehingga penelitian ini melakukan beberapa uji yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:207).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini juga menggunakan regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2018:307), regresi linear berganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen atau regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Penerapan metode regresi linear berganda adalah jumlah variabel yang digunakan lebih dari satu yang mempunyai satu variabel terikat. Rumus regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel
- X1 = Kejelasan sasaran anggaran
- X2 = Sistem pelaporan
- e = Tingkat kesalahan

3. Uji Kualitas Data, yaitu:**a. Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikannya lakukan dengan cara membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel. di dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan uji koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

- 1) Jika nilai r-hitung $>$ r-tabel maka butir pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai r-hitung $<$ r-tabel maka butir pertanyaan variabel dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:78), menyatakan uji reliabilitas merupakan alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Maksudnya apabila alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja.

Untuk uji reliabilitas merujuk pada suatu tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Suatu instrumen alat ukur reliabel dan bisa diproses pada tahap selanjutnya jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6. Jika instrumen alat ukur memiliki *Cronbach Alpha* $<$ 0,6 maka alat ukur tersebut

tidak reliabel (Sekaran, 2015:182). Keputusan reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dapat dinyatakan apabila diperoleh nilai r -hitung $>$ r -tabel dengan taraf signifikansi 5% maka butir pertanyaan tersebut reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang berdistribusi normal dikatakan valid dalam uji statistik. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $\geq \alpha$ (0,05) maka model regresi menghasilkan nilai residual yang terdistribusi secara normal, artinya data terdistribusi normal.
- 2) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $< \alpha$ (0,05) maka model regresi tidak menghasilkan nilai residual yang terdistribusi secara normal, artinya data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antara beberapa pengamatan atau tidak. Menurut Ghozali (2021:178), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi ada atau terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap berarti terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji glejser dalam menguji heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas (uji glejser) adalah:

- 1) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $> \alpha$ (0,05) maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $< \alpha$ (0,05) maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Menurut Ghozali (2021:157), dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah

dalam model regresi terdapat adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi dikatakan baik ketika tidak adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen. Untuk menguji ada atau tidak terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance dan *Variable Inflation Factor* (VIF).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas adalah:

- 1) Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai *tolerance* $\leq 0,10$, maka dikatakan terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$, maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

5. Uji Hipotesis, yaitu:

a. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018:98) uji beda *t-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam menguji uji t dengan signifikansi 5% adalah sebagai berikut:

- 1) Bila signifikan $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Bila signifikan $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali (2021:148) tujuan dari Uji F untuk mengetahui atau menguji apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji F adalah:

- 1) Jika nilai sig. F $> \alpha$ (0,05) maka diartikan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai sig. F $< \alpha$ (0,05) maka diartikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021:147), uji koefisien determinasi mempunyai tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis deskriptif terhadap data variabel-variabel yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Hasil Uji Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	96	18	30	26.09	2.267
Sistem_Pelaporan	96	20	30	26.30	2.047
Akuntabilitas_KIP	96	27	40	34.28	3.073
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti dengan jumlah responden 93 orang. Nilai standar deviasi dari semua variabel lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini berarti bahwa semua variabel tersebut memiliki sebaran data yang cukup baik, sehingga tidak terjadi outlier data yang mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson correlation*. Butir pernyataan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya di bawah 0,05. Berikut tabel hasil uji validitas dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Sig (2-Tailed)	Keterangan	
X1	X1.1	0,388	0,2006	0,000	Valid
	X1.2	0,762	0,2006	0,000	Valid
	X1.3	0,706	0,2006	0,000	Valid
	X1.4	0,667	0,2006	0,000	Valid
	X1.5	0,721	0,2006	0,000	Valid
	X1.6	0,354	0,2006	0,000	Valid
X2	X2.1	0,701	0,2006	0,000	Valid

	X2.2	0,737	0,2006	0,000	Valid
	X2.3	0,707	0,2006	0,000	Valid
	X2.4	0,394	0,2006	0,000	Valid
	X2.5	0,717	0,2006	0,000	Valid
	X2.6	0,532	0,2006	0,000	Valid
Y	Y.1	0,771	0,2006	0,000	Valid
	Y.2	0,498	0,2006	0,000	Valid
	Y.3	0,778	0,2006	0,000	Valid
	Y.4	0,659	0,2006	0,000	Valid
	Y.5	0,737	0,2006	0,000	Valid
	Y.6	0,634	0,2006	0,000	Valid
	Y.7	0,622	0,2006	0,000	Valid
	Y.8	0,788	0,2006	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.2 di atas maka dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan memiliki nilai Sig (2-Tailed) dan nilai dari masing-masing item tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Pengukuran	Ket.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,652	0,60	Reliabel
Sistem Pelaporan (X2)	0,703	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,839	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.3 di atas maka dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) adalah sebesar 0,652, variabel sistem pelaporan (X2) adalah sebesar 0,703, dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,839.

Nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari nilai *cronbach's alpha* standar yang digunakan yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38140730
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.046
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa data Kolmogorov Smirnov Test diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Penentuan ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai VIF > 10 dan *tolerance* > 0,1 maka terjadi kolinearitas.

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.997	1.003
	Sistem_Pelaporan	.997	1.003

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas_KIP

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.5 hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel diperoleh nilai *tolerance* variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,997 dan nilai VIF sebesar 1,003, dan variabel sistem pelaporan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,997 dan

VIF sebesar 1,003. Hal tersebut menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji glejser adalah apabila nilai signifikansinya > 0,05. Adapun hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.033	2.530		1.199	.234
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.028	.066	.044	.427	.671
	Sistem_Pelaporan	-.072	.073	-.101	-.982	.329

a. Dependent Variable: ABRESID
 Sumber: data primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.6 hasil uji glejser di atas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi X1 sebesar 0,671, dan nilai X2 sebesar 0,329, yang artinya variabel X1 dan X2 tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Adapun persamaan linear regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data maka diperoleh tabel berikut:

Tabel 3.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.618	4.159		.389	.698
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.567	.109	.418	5.195	.000
	Sistem_Pelaporan	.680	.121	.453	5.627	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_KIP
 Sumber: data primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 1,618 + 0,567X_1 + 0,680X_2$$

Pada persamaan di atas maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah 1,618, ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan) bernilai 0 maka nilai variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sebesar 1,618. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran adalah 0,567 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,567 yang disebabkan peningkatan nilai variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), dan apabila nilai variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi sistem pelaporan adalah 0,680 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,680 yang disebabkan peningkatan nilai variabel sistem pelaporan (X2), dan apabila nilai variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (uji-t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Hasil Uji Parsial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.618	4.159		.389	.698
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.567	.109	.418	5.195	.000
Sistem_Pelaporan	.680	.121	.453	5.627	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_KIP

Sumber: data primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.8 di atas yang merupakan tabel hasil uji parsial, maka dapat dilihat bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H₁) terima sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Variabel sistem pelaporan (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H₂) terima sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Uji Simultan

Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	358.652	2	179.326	30.955	.000 ^b
	Residual	538.755	93	5.793		
	Total	897.406	95			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_KIP
 b. Predictors: (Constant), Sistem_Pelaporan, Kejelasan_Sasaran_Anggaran
 Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) dan sistem pelaporan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.400	.387	2.407

a. Predictors: (Constant), Sistem_Pelaporan, Kejelasan_Sasaran_Anggaran
 b. Dependent Variable: Akuntabilitas_KIP
 Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,387 atau 38,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran dan variabel sistem pelaporan sebesar 38,7 %, sedangkan sisanya 61,3% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif.

Pengaruh signifikansi kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh besarnya peran indikator yang membentuk yakni (1) spesifik, (2) terukur, dan (3) berorientasi pada hasil akhir. Dari indikator-indikator yang membentuk variabel kejelasan sasaran anggaran tersebut, maka indikator pembentuk utama variabel kejelasan sasaran anggaran adalah indikator indikator dari pernyataan keenam dengan nilai rata-rata sebesar 4,52.

Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja. Hasil ini juga didukung oleh teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* yang menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh pegawai. Apabila pegawai berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Oleh karena itu maka semakin tinggi sasaran anggaran yang dicapai maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai (Precelina dan Wuryani, 2015:7).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Precelina dan Wuryani (2015) dan Widaryanti dan Pancawardani (2020) yang mengemukakan hasil penelitiannya dan berkesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif.

Pengaruh signifikansi sistem pelaporan sangat ditentukan oleh besarnya peran indikator yang membentuk yakni (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) manajemen. Dari indikator-indikator yang membentuk variabel sistem pelaporan tersebut, maka

indikator pembentuk utama variabel sistem pelaporan adalah indikator dari pernyataan kelima dengan nilai rata-rata sebesar 4,58.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan setiap OPD berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik maka akan tercipta pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan akuntabel. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Sistem pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas kinerja bagi keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Kartika dan Sukanto, 2019:80).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Precelina dan Wuryani (2015), Kartika dan Sukanto (2019), dan Widaryanti dan Pancawardani (2020) yang berhasil memberikan bukti secara empiris bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima semua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini yang terdiri atas kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Precelina dan Wuryani (2015), Widaryanti dan Pancawardani (2020) yang melakukan penelitian dengan variabel yang sama dan menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan sasaran anggaran dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05.
2. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05.
3. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji simultan yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Karismawati. (2018). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA). Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Fauzan, Reyhan Hady. (2017). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT). Jurnal Online Mahasiswa, 4(1), 122-136. Universitas Riau.
- Fitriana, Riska; Nur Hidayati dan M. C. Mawardi. (2018). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(2), 91-103. Universitas Islam Malang.
- Ghozali, Imam. (2016). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIETE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 23, EDISI 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Ghozali, Imam. (2018). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25 EDISI 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. (2021). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 26 EDISI 10. UNDIP Press: Semarang.
- Hafzhan, Muhammad. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Handayani, Rohmah Putri. (2023). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hariato, Deni; Kennedy dan Arumega Zarefar. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SKPD KABUPATEN ROKAN HILIR. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122-139. Universitas Riau.
- Hasanah, Atikah. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI MEDAN). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ilmar, Aminuddin. (2020). KEPEREMINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB MELALUI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN. *Phinatama Media*: Makassar.
- Kartika, Rusnanda Dian dan Sukamto. (2019). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA DINAS DAERAH KOTA

- SURABAYA). *Jurnal Liability*, 1(2), 63-83. Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya.
- Kinasih, Heksi. (2018). PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mikoshi, Madelyn Sonya. (2020). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS KONI SE-SUMATERA BARAT). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192-199. Universitas Andalas.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH. Jakarta.
- Preceлина, Devika Diah dan Eni Wuryani. (2015). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3) 1-10. Universitas Negeri Surabaya.
- Sekaran, Uma. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN UNTUK BISNIS (RESEARCH METHODS FOR BUSINESS)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.

- Sugiyono. (2018). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Wahyuni; Raja Adri Satriawan Surya dan Enni Savitri. (2014). KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU). *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1-15. Universitas Riau.
- Widaryanti dan Nurul Latifah Pancawardani. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SKPD KOTA SEMARANG. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477-492. STIE Pelita Nusantara. Semarang.
- Zakiyudin, M. Ali dan Suyatno. (2015). KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 89-96. Universitas Pancasila.